

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Intervensi Fiskal Pemerintah Pusat Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1. Apa urgensi adanya pengaturan mengenai intervensi fiskal terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 2. Apa akibat dari intervensi fiskal pemerintah pusat terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan Kepala Daerah? Kesimpulan pertama adalah bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pusat terlalu mengintervensi pemerintah daerah khususnya penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Pengawasan pusat tetap diperlukan terhadap daerah agar tidak terdapat pungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak ditentukan berdasarkan undang-undang dan kepentingan. Namun pemerintah daerah harus tetap diberi kewenangan dalam pembentukan Perda mengenai tarif pajak dan retribusi daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya untuk kesimpulan kedua adalah ketentuan mengenai intervensi fiskal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut membatasi kewenangan kepala daerah untuk menggali potensi daerahnya sendiri. Meskipun di sisi lain, ketentuan ini dapat mengakibatkan kebijakan fiskal di daerah selaras dengan kebijakan fiskal secara nasional.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Intervensi Fiskal, UU Cipta Kerja

**ABSTRACT**

*The title of this thesis is "Fiscal Intervention of Central Government on Local Tax and Regional Retribution in Job Creation Law". The research method used is statute approach and conceptual approach. The legal issues in this research are: 1. What is the urgency for the regulation of fiscal intervention on local taxes and levies regulated by the Job Creation Law? 2. What is the impact of the central government fiscal intervention on regional taxes and levies in the Job Creation Law on the authority of the Regional Head? The first conclusion is that in the Job Creation Law, the central government intervenes too much in the regional government, especially in setting local tax rates and local user fees. Central supervision is still needed for the regions so that there are no regional taxes and levies that are not determined by law and interests. However, the regional government must still be given the authority to form regional regulations regarding local tax rates and levies as the organizer of regional government affairs. Furthermore, for the second conclusion, the provisions regarding fiscal intervention in the Job Creation Law limit the authority of regional heads to explore the potential of their own regions. Although on the other hand, this provision could result in fiscal policy in the regions being in line with national fiscal policy.*

*Keywords: Regional Autonomy, Fiscal Intervention, Job Creation Law*